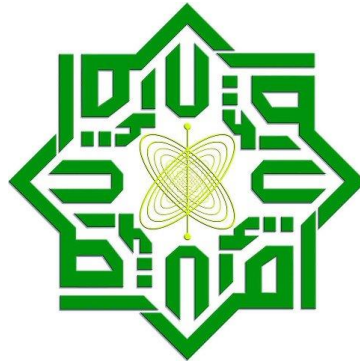


SKRIPSI MINOR

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA PT. BANK BRI SYARIAH PEKANBARU

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Tugas-tugas Akademik dan
Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

Muhammad Arif
01074102888

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN DENGAN GADAI EMAS PADA BANK BRI SYARIAH PEKANBARU

OLEH
MUHAMMAD ARIF
01074102888

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah analisis prosedur dengan gadai emas di Bank BRI Syariah Pekanbaru sudah efektif dan memenuhi standar syariah.

Analisis prosedur pada pemberian pinjaman dengan gadai emas ini dilakukan dengan cara nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta membawa persyaratan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Setelah semua syarat diserahkan nasabah kepada bank, pihak bank akan menaksir emas yang akan digadaikan. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai, maka pihak bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah tersebut. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah diwajibkan mengisi Aplikasi Permohonan Gadai (APG) rahn emas yang telah disediakan PT. Bank BRI Syariah. Maka akan terjadi akad penandatanganan atas kedua belah pihak dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya materai dan biaya ujah (biaya pemeliharaan) serta membuka buku rekening di bank BRI Syariah. Dan setelah pembayaran tersebut maka pihak bank akan mencairkan dana pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah. Sangat beresiko dari pihak bank karena barang yang digadaikan tidak dapat diketahui kebenaran pemilikinya. Karena tidak disertai surat keterangan pemilik atau faktur pembelian atas emas yang akan digadaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masalah seperti tidak dimintanya surat keterangan atau faktur atas pembelian emas tersebut dan ruangan transaksi yang kecil.

Maka dari itu sebaiknya Bank BRI Syariah Pekanbaru harus menegaskan kepada nasabah untuk menyertakan surat keterangan pemilik atau faktur pembelian emas, menyediakan tempat sesuai dengan kuota pegawai dan nasabah dan mengoptimalkan pelayanannya dalam gadai emas ini.

Kata Kunci : Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman, Gadai Emas Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan kasih sayang, sehingga dengan rahmat dan kasih sayang penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi Minor) ini dengan baik dan benar.

Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat manusia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pelopor umat islam, sang revolusioner umat manusia, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan (jahiliyah) menuju zaman yang serba ilmu pengetahuan, semoga kita nantinya akan mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiyamah. Amin Allahuma Amin.

Tugas akhir ini dengan judul “ **Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru,**” adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaannya, akan tetapi penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna karena masih banyak kekurangan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang selama ini telah membantu penulis baik materil maupun moril kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Saniurman dan Ibunda Fitriani tercinta, yang selama ini mencurahkan kasih sayanganya kepada penulis, berkat kasih sayang dan do'a yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Do'a dan ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan, yang akan selalu menemani perjalanan hidup penulis.
2. Kakak, Abang, Adek, Abang ipar, dan keponaan yang selalu memberi dukungan dan semangat hinga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. M. Nazir Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta Pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Ayahanda Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi DIII Fekonsos UIN Suska Riau yang selalu memberikan masukan serta petunjuk kepada penulis.
6. Ibunda Jasmina Syafei, SE, M.Ak, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Dan

selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan serta petunjuk kepada penulis hingga tugas akhir ini terselesaikan.

7. Ayahanda Doni Martias, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi dan do'anya sehingga penulis telah menyelesaikan studi diprogram Diploma III Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Pimpinan Serta staff dan karyawan pada PT. Bank BRI Syariah KC. Pekanbaru. yang telah banyak memberikan data dan informasi untuk penulisan ini.
10. Yuliza dan Keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Jumadi dan Zurman yang selalu memberi support dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
12. Andi Rizky, Angga Saputra, Ikhwanul Muslim, dan Mahmuda Rianto yang selalu memberi support dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
13. Senior dan alumni DIII Akuntansi yang banyak mendukung penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
14. Seluruh teman-teman kelas (lokal A, B dan C) yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

15. Adik-adik tingkat, yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

16. Rekan-rekan HMJ D3 Akuntansi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

17. Dan seluruh rekan-rekan yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu namanya.

Semoga Allah SWT. Mencatat jasa baik mereka sebagai nilai ibadah di sisinya, dan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Billahitaufik Walhidayah

Pekanbaru, Mei 2013
Penulis

Muhammad Arif
Nim. 01074102888

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah	9
B. Visi dan Misi Bank BRI Syariah.....	10
C. Sistem Operasi Bank BRI Syariah Pekanbaru	11
D. Langkah Strategis Bank BRI Syariah	12
E. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Pekanbaru	13
F. Produk – Produk Bank BRI Syariah Pekanbaru	19

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori	23
1. Pengertian Bank.....	23
2. Pengertian Bank Syariah	27
3. Pengertian Pegadaian Syariah	27
4. Pengertian Prosedur	30
5. Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah dan Konvensional	31

6. Dasar Hukum Gadai Syariah	32
7. Rukun dan Syarat Perjanjian Gadai.....	35
8. Penyelesaian gadai.....	37
9. Berakhirnya Akad Rahn	37
B. Tinjauan Praktek.....	38
a. Prosedur Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Pekanbaru	38
b. Petunjuk Pelaksanaan Produk Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Pekanbaru	45
c. Operational Pembiayaan Gadai Syariah	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang setiap individu dan masyarakat tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga. (Kasmir,2004:2)

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, yang dulu disebut juga undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dengan dibukanya PT. Bank BRI Syariah di Pekanbaru, masyarakat Riau umumnya dapat menjadikan bank ini sebagai alternatif lain dalam menggunakan jasa perbankan. PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aspek syariah juga ikut melandasi dimana masih banyak dikalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank konvensional yang menggunakan sistem ribawi. Beberapa aspek di atas memungkinkan beroperasinya PT. Bank BRI Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dalam memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah PT. Bank BRI Syariah atau yang belum.

PT. Bank BRI Syariah memiliki tugas pokok yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya baik berupa pembiayaan maupun fasilitas pelayanan lainnya untuk masyarakat. Sebagai bank yang memberikan berbagai macam fasilitas pembiayaan, PT. Bank BRI Syariah juga menawarkan produk pembiayaan Musyarakah dimana transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dalam bentuk sumber daya baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat berupa dana, kepandaian, dan peralatan.

Salah satu produk perbankan syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah gadai emas/*rahn*. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan

menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Masyarakat pekanbaru khususnya menganggap kehadiran Gadai emas syariah saat ini menjadi primadona bagi masyarakat yang memberikan dana segar dengan cepat. Masyarakat juga memiliki pilihan tempat untuk melakukan gadai emas. Gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah memiliki kelebihan, seperti persyaratan mudah, proses cepat dan mudah, margin rendah, bebas biaya administrasi (ADM), pencairan dana cepat, dan pembayaran dilakukan dibelakangan. Segala kelebihan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau wirausahawan untuk melakukan gadai emas secara syariah.

Produk gadai emas juga memiliki beberapa keuntungan bagi lembaga keuangan syariah maupun bank syariah. Ada tiga keuntungan yang diperoleh bank syariah dari produk gadai emas, yaitu margin rendah, taksiran tinggi dari bank syariah lainnya, bagi bank aman karena ini ibarat seperti Kredit Tanpa Resiko (KTR), Keuntungan dan kelebihan yang dapat diberikan oleh gadai emas syariah baik bagi masyarakat maupun bank syariah menjadikan produk pembiayaan ini memiliki prospek yang bagus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi Islam dan ikut serta dalam memperluas penerapan ekonomi Islam di Indonesia.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perjanjian gadai ini adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kegiatan pegadaian pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru adalah *rahn* emas, dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn*. *Qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam rangka waktu tertentu. Kemudian biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa).

Kegiatan gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru mulai beroperasi pada tahun 2009. Mulai pada saat itu PT. Bank BRI Syariah terus memasarkan produknya yang berupa gadai emas kepada para nasabahnya itu sampai sekarang terutama di kota pekanbaru.

Dalam analisis prosedur pemberian pinjaman gadai emas ini, nasabah datang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta membawa persyaratan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Setelah semua syarat diserahkan nasabah kepada bank, pihak bank akan menaksir emas yang akan digadaikan. Jika penaksiran emas tersebut telah selesai, maka pihak bank akan mengkonfirmasi kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah tersebut, terjadilah tawar menawar antara nasabah dan pihak bank. Setelah nasabah menyetujui jumlah pinjaman, maka nasabah diwajibkan mengisi Aplikasi Permohonan Gadai (APG) *rahn* emas yang telah disediakan PT. Bank BRI Syariah. Maka akan terjadi akad dan penandatanganan atas kedua belah pihak dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya materai dan biaya ujrah (biaya pemeliharaan) serta membuka buku rekening di bank BRI Syariah. Dan setelah pembayaran tersebut maka pihak bank akan mencairkan dana pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah.

Didalam analisis prosedur gadai emas di PT. Bank BRI Syariah, masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya nasabah tidak di harus menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut (surat resmi kepemilikan) kepada pihak bank. Seharusnya bukti kepemilikan tersebut harus ada, agar tidak ada keraguan dalam hal kepemilikan/keabsahan barang yang digadaikan. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat *rahn*, dimana barang yang *dirahnkan* memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari nasabah, dan tidak terkait hak orang lain (Anshori, 2005:125).

Maka dengan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman Dengan Gadai Emas pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah analisis prosedur pemberian pinjaman atas gadai emas di Bank BRI Syariah Pekanbaru sudah efektif?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Untuk mengetahui apakah analisis prosedur pemberian pinjaman atas gadai emas di Bank BRI Syariah Pekanbaru sudah efektif.

b. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan betapa pentingnya analisis prosedur pinjaman Gadai Emas yang efektif.
2. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku kuliah.
3. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah serta bagaimana aplikasinya di lapangan
4. Sebagai bahan informasi bagi pihak bagian gadai pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

D. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2012.

b. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru. Pengumpulan yang dilakukan penulis untuk penulisan laporan ini menggunakan metode sebagai berikut.

a. Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung pada karyawan bagian gadai PT. Bank BRI Syariah terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan beserta struktur organisasi, langkah strategis dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

Bab III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi pengertian bank, pengertian bank syariah, pengertian pegadaian syariah (rahn), persamaan dan perbedaan gadai di bank konvensional, dasar hukum pegadaian syariah, rukun dan syarat sah gadai, dan berakhirnya akad rahn.

Bab IV: PENUTUP

bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi dan Misi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan menetapkan Visi dan

Misi bisnis untuk usahanya. Visi dan Misi perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

a. Visi PT. Bank BRI Syariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi PT. Bank BRI Syariah

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

C. Sistem Operasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru

PT. Bank BRI Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al – Qur'an dan as – Sunnah.

Prinsip utama PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru :

- a. Dioperasikan berdasarkan AL – Qur'an dan as – Sunnah (Syariat Islam).
- b. Melakukan transaksi yang halal.

- c. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual – beli, sewa profit & falah oriented.
- d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan (partnership).
- e. Adanya tanggung jawab sosial & keagamaan.
- f. Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.

D. Langkah Strategis PT. Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah tak mau ketinggalan dalam mendapatkan SDM berkualitas, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Tak tanggung-tanggung, sebelas institusi pendidikan digandeng BRI Syariah dalam rangka mencari bankir syariah dengan training selama 2 bulan.

Program World Banking Student Academic digelar BRI Syariah bekerja sama dengan 11 institusi pendidikan, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, STIE Tazkia, Universitas Pajajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Diponegoro (Undip). Para peserta yang mengikuti training berpeluang menjadi karyawan BRI Syariah. Biaya training sepenuhnya dari pihak kampus atau pribadi mahasiswa dan dapat dikembalikan jika terpilih menjadi karyawan BRI Syariah.

Banyak pihak menilai langkah ini sebagai strategi jitu dalam menjaring SDM perbankan syariah yang berkualitas dan profesional. Seperti yang

diharapkan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Mustafa Edwin Nasution yang turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut pada Kamis (14/10) lalu.

“Model kerjasama seperti inilah yang sangat di tunggu dimana antara praktisi dan ahli bisa bersinergi dalam memecahkan permasalahan SDM perbankan syariah,” ujarnya.

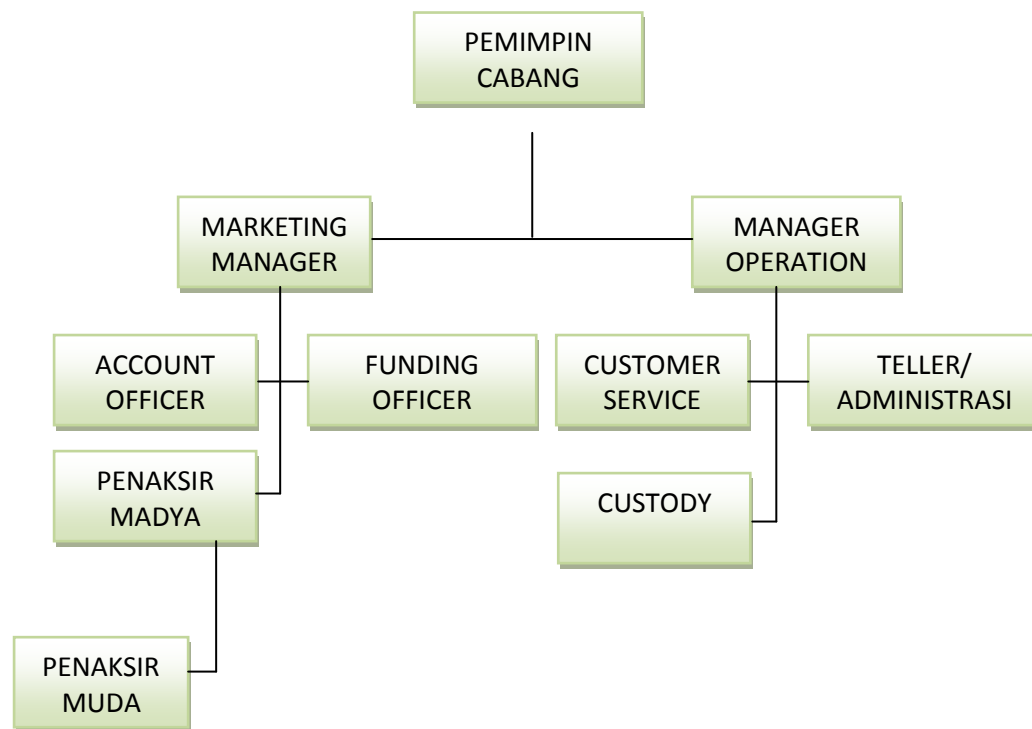
Tentu saja, kita berharap kegiatan semacam ini dapat dilakukan oleh bank syariah lain tanpa ada kesan memberatkan bagi para peserta, misalnya dengan biaya yang cukup tinggi. Kedepannya, sinergi antara akademisi dan lembaga keuangan syariah memang masih dibutuhkan, salah satunya untuk suplai SDM berkualitas.

E. Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga perbankan, struktur organisasi mempunyai arti sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usahanya dapat berjalan baik dan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing – masing unsur dapat berjalan secara profesional, simbiosis mutualisme dan sistematis.

Struktur organisasi juga dapat memudahkan berkomunikasi antara sesama karyawan, dapat memudahkan karyawan dalam berkomunikasi serta memperlancar pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru, akan lebih jelas dapat dilihat pada gambar :

Gambar II.1**Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru**

Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing – masing bagian struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Group Mikro dan Individu

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab kepala group mikro PT. Bank BRI Syariah adalah:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan rencana jangka panjang (Corporate Plan) produk Gadai iB di BRI Syariah yang di buat dalam rencana bisnis – pembiayaan Bank BRI Syariah yang untuk selanjutnya disahkan oleh direktur bisnis.

- b. Secara berkala meminta penetapan standar taksiran logam (STL) emas dari head of treasury untuk kantor-kantor cabang (KCI, KC, KCP).
- c. Mengamankan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kebijakan direksi terkait dengan pengembangan produk gadai iB BRI Syariah.
- d. Merencanakan strategi bisnis produk gadai iB dalam rangka pengembangan bisnis produk gadai iB dan membuat pedoman Rahn (Gadai), petunjuk pelaksanaan produk gadai iB BRI Syariah, pedoman taksiran emas untuk mendukung pengembangan dan pengamanan seluruh kegiatan bisnis produk gadai iB.
- e. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap produk gadai iB di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu agar target minimal tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan tercapai dengan baik.

2. Pimpinan Cabang Induk/Pimpinan Cabang/Pimpinan Cabang Pembantu

Tugas – tugas pokok Pimpinan Cabang Induk diantaranya adalah :

- a. Menbuat rencana kerja dan anggaran tahunan bisnis produk gadai iB untuk kantor cabang, induk, dan kantor cabang serta kantor cabang pembantu termasuk kantor layanan syariah (KLS) di Bank BRISyariah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional produk gadai iB kantor cabang, cabang pembantu (Capem) dan kantor unit operasional serta KLS yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan produk gadai iB di kantor cabang, kantor capem dan kantor unit operasional dan hasilnya dilaporkan ke group mikro dan individu di kantor pusat.
- d. Secara berkala melakukan audit operasional seluruh kegiatan produk gadai iB di kantor cabang, kantor capem dan kantor unit operasional serta KLS.
- e. Melaksanakan pengawasan melekat seluruh kegiatan operasional baik terhadap kegiatan operasional, pertanggung jawaban barang jaminan maupun keuangan perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Satuan Pengawasan Internal (Auditor)

Bagian ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kegiatan pemeriksaan operasional produk gadai iB di kantor cabang, kantor capem, kantor unit operasional serta KLS.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional produk gadai iB di kantor dalam rangka tindakan preventif tindak penyimpangan atau kecurangan.
- c. Melaksanakan pemeriksaan (Audit) secara rutin sesuai dengan rencana program pemeriksaan yang telah disetujui oleh atasan.
- d. Mengembangkan sistem dan metode pemeriksaan.
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan.

4. Penaksiran Madya

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan supervise terhadap seluruh hasil taksiran oleh penaksir muda selanjutnya memutuskan besaran pinjaman

(pemutus kredit) sesuai dengan kewenangan atau memberikan rekomendasi keatasan / komite pinjaman gadai satu tingkat di atasnya untuk besaran pinjaman bagi yang bukan kewenangannya.

5. Penaksiran Muda

Bagian ini mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perusahaan yang berlaku
- b. Melakukan verifikasi pengisian data nasabah yang tercantum di aplikasi gadai syariah dan surat kuasa dengan identitas diri / KTP nasabah.
- c. Verifikasi keabsahan KTP serta verifikasi tanda tangan nasabah.
- d. Memberikan pelayanan yang profesional yang berorientasi kepada kepuasan nasabah.
- e. Melakukan taksiran barang jaminan dan nilai pinjaman gadai sesuai dengan limit dan kewenangannya dan meneruskannya kepada atasannya / penaksir madya untuk kepuasan lebih lanjut; melakukan perhitungan seluruh kewajiban yang harus di bayar oleh nasabah (pokok pinjaman, upah simpan dll) khusus pada saat nasabah melunasi pinjaman

6. Petugas Pengelola Barang Jaminan

Petugas pengelola/penyimpan “BARANG JAMINAN” adalah seorang pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan tempat penyimpanan barang jaminan termasuk isi yang tersimpan didalamnya sesuai dengan surat penunjukannya dari pejabat yang berwenang (sesuai dengan surat keputusan

penunjukannya) dalam hal ini petugas pengelola/penyimpan barang jaminan adalah penaksir madya.

7. Teller

Tugas seorang teller yaitu :

- a. Melayani nasabah yang melakukan transaksi setoran, penarikan dll.
- b. Melaksanakan pembayaran pinjaman gadai kepada nasabah.
- c. Melaksanakan penerimaan pelunasan pinjaman gadai dari nasabah

8. Pimpinan Seksi Operasional

Bagian ini mempunyai tugas mengelola dan mengatur seluruh masalah yang berkaitan dengan operasional bank.

9. Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan

Pelayanan Administrasi Pembiayaan bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah administrasi pembiayaan.

10. Pelaksanaan Pembiayaan Konsumtif

Bagian ini mempunyai tugas mengurus masalah pelayanan pembiayaan konsumtif.

11. Pelaksanaan Akuntansi Laporan

Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan – laporan keuangan.

12. Satpam

Yaitu karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah keamanan bank.

F. Produk – Produk Bank BRI Syariah

1. Pembiayaan IB Mikro

Disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik perseorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah.

2. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB)

Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Murabahah ialah pembiayaan yang diberikan pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

3. Tabungan iB Faedah

Tabungan iB Faedah adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan perorangan secara professional dan memenuhi kaidah syari'ah. Keuntungan dari pembiayaan ini dibagi antara nasabah dan bank sesuai porsi (nasabah) yang disepakati dimuka.

4. Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah (KPR)

Pembiayaan iB Kepemilikan rumah bersedia membantu pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya termasuk rumah susun /kondominium, ruko, kios, rukan, apartemen, vila dan kavling siap bangun dengan prinsip murabahah.

5. Qardh Beragun Mas (Rahn)

Qardh Beragun Mas iB (Rahn Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan PT. Bank BRI Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

6. Pembiayaan iB Kepemilikan Mas (PKI)

Pembiayaan iB Kepemilikan Mas (PKI) membantu nasabah mendapatkan modal dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip syariah.

7. iB Dhuha Tabungan Haji

Adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus. Kini tabungan iB Dhuha hadir dalam 2 (dua) skim syariah. Pertama, simpanan yang bersifat titipan /wadiah (Dhuha Bebas) sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji serta bebas menentukan nominal setoran berdasarkan kemampuan. Kedua, simpanan dengan kontrak bagi hasil/mudharabah antara Bank dan nasabah (Duha Terencana) dimana nasabah akan memperoleh porsi (nisbah) bagi hasil dari keuntungan usaha Bank namun waktu keberangkatan serta jumlah setoran perbulanannya telah direncanakan sesuai dengan keinginan nasabah.

8. Giro iB

Adalah sarana penyimpanan dana dengan prinsip wadiah (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dengan giro iB maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer,

dana dan pembayaran tunai sewaktu – waktu. Dengan rekening giro ini membantu anda melakukan pembayaran maupun penyetoran atas transaksi keuangan secara praktis.

9. Pembiayaan iB Kredit Multi Guna (KMG)

Pembiayaan iB Kredit Multi Guna adalah, pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka pembiayaan untuk perumahan, pembangunan /rehabilitasi /renovasi rumah sendiri, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan iB Kredit Multi Guna juga dapat diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh Nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

10. Deposito iB

Deposito iB adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang penarikan nya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank. Produk ini hadir agar simpanan anda di Bank diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu dan insya Allah mendapat bagi hasil atas hasil usaha Bank. Melalui doposito iB Bank BRI Syariah insya Allah anda akan memperoleh barokah dan mendapatkan bagi hasil yang akan dilimpahkan secara langsung ke rekening anda setiap bulan.

11. iB Prima

membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya sesuai syariah.

12. Tabungan Impian

Tabungan Impian diperlukan sebagai investasi dalam arti dana tabungan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum dan disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

Menurut Hasibuan (2005:4) bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kemasyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut *Darmawi* (2011:1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Ktut Silvanita (2009:14) mendefenisikan bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana-mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya.

Menurut Velyn Stuart bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Martono,2004:20)

Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya (Kasmir,2008:25)

Menurut Kasmir (2004;8) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Fuady (2003:15) Bank yaitu suatu bangku tempat duduk yang biasa digunakan oleh para bankir Italy dihalaman pasar pada saat memberikan pinjaman-pinjaman.

Sedangkan menurut Undang-undang no 10/ 1998 definisi perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi menarik atau mengumpulkan dana dari pihak ketiga dan kemudian disalurkan kembali kepada nasabah atau masyarakat melalui fasilitas kredit atau pembiayaan.

Bank indonesia (BI) merupakan bank milik negara dan merupakan badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan undang-undang Bank Indonesia (UU Nomor Tahun 1999)

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 menyatakan :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat dari unit surplus kepada unit deposito atau memindahkan uang dari penabung kepada peminjam. Ada beberapa fungsi bank umum atau bank komersial adalah (Usman, 2004:59) :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan melalui penyaluran kredit investasi.
- c. Menghimpun dan menyalurkan masyarakat.
- d. Menyediakan jasa – jasa pengolahan data.
- e. Menyediakan dana untuk perdagangan nasional.

- f. Memberikan pelayanan penyimpanan barang – barang berharga.
- g. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek, perjalanan wisata, ATM dan sebagainya.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, bank memiliki peranan penting dalam perekonomian. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Peranan Bank menurut Sinungan (2003:111) antara lain :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat.
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat.
3. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi.

Manurung (2004:17) mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada laba dan untuk memperoleh laba tersebut bank melaksanakan fungsi intermediasi.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.

2. Pengertian Bank Syariah

Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat,

dalam literature Islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari'ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al Hadist.

3. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al-subut* dan *al-babs* yaitu penetapan dan penataan. Sedangkan menurut hukum istilah, *rahn* berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang

jaminan. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dalam arti akad yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.

Menurut Sabiq (2003:139), *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil

sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak ataupun barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Gadai emas merupakan pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta / barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar – rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjam / utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah tersebut.

Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya. (At-Thayyar, 2004:45).

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandzur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya (Hope, 2003:1480).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) dalam pandangan Islam adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan

(seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Menurut Ibnu Qudhamah dalam Kitab al – Mughni rahn adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang terhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al – Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003 : 157).

4. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Pengertian prosedur menurut Ismail Masya (2003:74) mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang – ulang”.

Menurut Kamaruddin (2006:836 – 837) “Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”.

Menurut Muhammad Ali (2003 : 325) “Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”.

Menurut Ibnu Syamsi, SW (2004:16) “Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

5. Perbedaan dan Persamaan Antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Perbedaan dan persamaan antara Gadai Syariah dan Gadai Konvensional diuraikan sebagai berikut.

Perbedaannya adalah :

1. Gadai syariah atau *rahn* dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang telah ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai konvensional berlaku pada harta bergerak seperti (emas, berlian, dan kendaraan), sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak (tanah dan bangunan serta peralatan). Pada

hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan persediaan disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No. 4 1996.

Sedangkan persamaannya adalah :

1. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
2. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
3. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
4. Hak gadai berlaku atas jaminan uang.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

6. Dasar Hukum Gadai Syariah

Berdasarkan dasar hukum Islam, pegadaian diatur dalam Al – Quran, Sunnah, dan Ijtihad.

Berdasarkan Al – Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al – Baqarah ayat 282 dan 283 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat diatas merupakan pedoman dalam urusan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa pinjaman dengan jaminan dan lain sebagainya. Mengingat perjanjian yang telah disepakati maka harus dipenuhi dengan adil, oleh pihak yang diberi amanat. Begitu juga dengan perbankan sekarang yang melakukan transaksi gadai emas harus memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya atas dana yang dipinjamkan oleh Bank.

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan sebagaimana firman Allah Swt :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثَرُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸ ﴾

Artinya :

“dan jika kamu berada Dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang Yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang Yang memberi hutang). kemudian kalau Yang memberi hutang percaya kepada Yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) Yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang Yang diamanahkan kepadaNya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (Wahai orang-orang Yang menjadi

saksi) menyembunyikan perkara Yang dipersaksikan itu. dan sesiapa Yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang Yang berdosa hatinya. dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan”.

Rosulullah juga membolehkan *rahn* ini karena beliau sendiri juga pernah melakukannya. Nabi Muhammad Saw bersabda dalam Hadist beliau yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَ الْأُحْلَى .

Artinya: “Dari anas, ia berkata: Nabi Saw, pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang yahudi dimadinah dan nabi mengambil gandum dari siyahudi itu untuk keluarganya”.

Pada hadis diatas merupakan acuan pada proses transaksi gadai emas pada BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru saat ini. Sebab untuk menerima dana dari pihak bank, nasabah tentu harus menjaminkan barang emasnya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda yang artinya : *apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang diperah boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada*

orang orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai – Bukhari).

7. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut (Anshori, 2005:114) :

a. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain:

1. *Ar-Rahin* (yang mengadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bias dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.

4. *Al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, ijab* dan *qabul*

b. Syarat Gadai Syariah

1. *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn* yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

2. *Sighat*

1. Tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
2. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat-syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *marhun bih* (utang)

1. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
2. Memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu menjadi utang tidak bias dimanfaatkan, maka tidak sah.
3. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan perkataan lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab andainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung

unsure riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

4. *Marhun* (barang)

Perihal barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, haruslah merupakan barang milik sipemberi gadai dan barang itu ada saat diadakan perjanjian gadai. Menyangkut barang-barang yang dijadikan sebagai objek gadai ini dapat dari macam-macam jenis barang gadaian tersebut berada dibawah penguasaan penerima gadai (*murtahin*).

8. Penyelesaian Gadai

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*. Hendaklah ia memberikan keizinan kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh sipemberi gadai, maka sipenerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa sipemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada sipenerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut (Pasaribu,2004:143).

Pembelinya boleh *marhin* sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut, hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat bila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan pada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.

9. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai, maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin untuk menjual barang gadaian tersebut (Anshori, 2005:96).

B. Tinjauan Praktek

a. Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah (*Rahn*) Pada Bank BRI

Syariah Pekanbaru

Bank BRI Syariah Pekanbaru sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan perekonomian dengan membantu menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha – usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup dengan asas tolong menolong berdasarkan prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas – tugas pokok tersebut, maka Bank BRI Syariah Pekanbaru menyalurkan dana dalam bentuk Gadai. Adapun jenis gadai yang penulis titik beratkan di pembahasan ini yaitu Gadai Emas Syariah.

Gadai emas syariah iB merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan Bank BRI Syariah Pekanbaru kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai syariah. Adapun analisis prosedur pemberian gadai emas iB ini adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Bank BRI Syariah Pekanbaru dengan membawa :
 - a. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) atau paspor yang asli.
 - b. Membawa KK (Kartu Keluarga) yang asli.
 - c. Membawa emas yang mau digadaikan dengan kadar emas 16 sampai 24 karat atau perhiasan batangan.
2. Petugas bank yaitu penaksir muda mengisi taksiran emas yang ditaksir dengan cara mengukur kadar emas dengan alat taksir emas.

No	Kadar Emas (karat)	Harga taksiran Bank BRI Syariah (maksimal plafon yang dapat diberikan)
1	16 Karat	Max. 90% dari nilai taksir
2	18-24 Karat	Max. 90% dari nilai taksir
3	24 Karat (Gold Bar)	Max. 90% dari nilai taksir

3. Setelah penaksir muda selesai mentaksir serta mengisi taksiran emas atau perhiasan/emas tersebut, maka penaksiran muda akan menyerahkan kepada penaksir madya untuk menentukan dan memutuskan berapa besaran pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah tersebut.
4. Nasabah melakukan pengisian Aplikasi Permohonan Gadai (APG) rahn emas. Dengan cara mengisi:
 - a. Data pribadi : nama lengkap, no. KTP/SIM, NPWP (jika ada), alamat, dan no telepon yang bisa dihubungi.
 - b. Data pinjaman : pekerjaan, tujuan pinjaman, sumber pelunasan, status barang, dan cara penarikan.

5. Nasabah akan mengisi dan menandatangani surat rahn emas yang berisi perjanjian/akad. Akad yang terjadi dalam proses gadai emas ini terdiri atas 3 akad yaitu :

a. Akad Qardh

Akad qardh berisi tentang pinjam – meminjam yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari.

Adapun ketentuan dan syarat – syarat dalam akad qardh adalah sebagai berikut :

1. Qardh merupakan akad pinjam – meminjam yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
2. Bank atau Muqarid adalah pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada nasabah.
3. Nasabah atau Muqtarid adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada bank pada saat jatuh tempo.
4. Bank dengan ini mengikat diri untuk memberikan pinjaman uang dan oleh karena itu berpiutang serta berhak menagih kepada nasabah sejumlah uang atau bagian dari hutang yang belum dibayar oleh nasabah.
5. Nasabah menerima pinjaman uang dan oleh karena itu mengaku berhutang serta berjanji akan mengikat diri untuk membayar kembali

kepada bank sejumlah uang dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan.

b. Akad Ijarah

Akad ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Adapun ketentuan dan syarat – syarat akad ijarah adalah sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat atas barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila telah jatuh tempo, sementara itu penyewa belum melunasi pinjaman maka diberikan masa tenggang 15 hari dengan membayar biaya pemeliharaan sebesar biaya tempat penyimpanan selama 1 bulan. Sebaliknya apabila penyewa melunasi sebelum 30 hari maka dapat diberikan bonus yang besarnya tidak diperjanjikan oleh yang menyewakan.
2. Pinjaman yang tidak dilunasi setelah masa tenggang 15 hari, maka barang jaminan akan dijual sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
3. Pembayaran biaya pemeliharaan wajib dibayar dimuka oleh penyewa kepada yang menyewakan kecuali untuk biaya pemeliharaan masa tenggang yang dibayar pada saat pelunasan pinjaman.
4. Barang jaminan untuk pinjaman yang telah dilunasi dan tidak diambil dalam masa 5 hari kerja, maka penyewa setuju melakukan

penyewaan tempat penyimpanan sehingga wajib membayar sewa tempat sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Jika barang jaminan rusak/hilang, maka penyewa akan mendapat penggantian dari yang menyewakan sebesar 100% dari nilai taksiran barang jaminan tersebut kecuali hilang/rusaknya barang jaminan disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan (*force majeure*) yang menyewakan seperti bencana alam, sabotase, perang, dan kerusakan. Untuk itu tidak diberikan ganti rugi.

c. Akad Rahn

Akad rahn merupakan akad yang terjadi antara kedua belah pihak yang telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian rahn (gadai). Akad rahn mempunyai ketentuan dan syarat – syarat berikut :

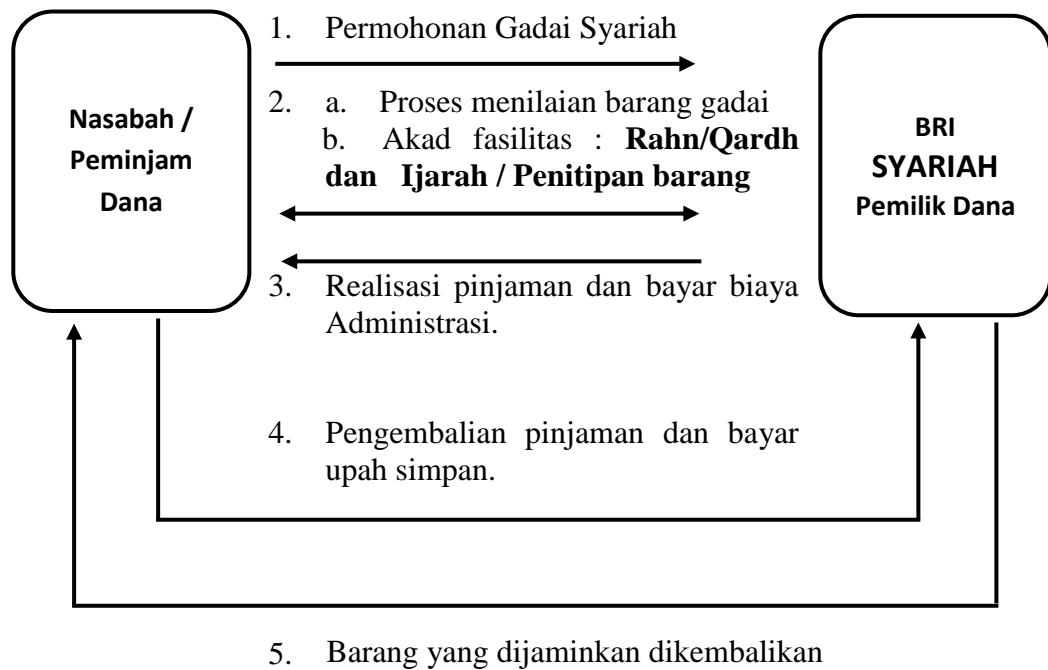
1. Rincian emas yang tercantum dalam spesifikasi barang jaminan di surat gadai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad qardh.
2. Nasabah menjamin bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya.
3. Nasabah menjamin bahwa bank tidak akan dapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas emas tersebut sebagai pemilik dan oleh karena itu bank dibebaskan oleh nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya nasabah membebaskan serta mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang

dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada bank sebagai akibat tuntutan atas gugatan tersebut.

4. Bank menerima barang dari nasabah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang jaminan yang dititipkan tersebut termasuk mengenai keberadaannya, jumlahnya, keadaannya. Oleh karena itu, wajib memelihara dengan sebaik-baiknya, mengganti dengan barang yang sama jenis dan nilainya jika barang – barang tersebut hilang atau rusak selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.
5. Bank dan nasabah menyetujui bahwa penyerahan barang jaminan (*marhun*) yang dilakukan dan diterima dengan perjanjian bahwa barang – barang tersebut terhitung sejak tanggal akad qardh ditandatangani.
6. Setelah uang pinjaman atas gadai emas telah di transfer pihak bank, dan nasabah telah mengkonfirmasi bahwa uang pinjaman telah di transfer, nasabah pulang dan harus melunasi pinjaman gadai emas syariah tiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang diatas.
5. Nasabah membayar biaya materai dan biaya ujah (pemeliharaan) kepada pihak bank, dan setelah itu pihak bank akan mencairkan dana pinjaman dengan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah.

Gambar III.1**Skema Fasilitas Gadai Emas Bank BRI Syariah**

Skema analisis prosedur fasilitas pinjaman gadai Syariah di Bank BRISyariah adalah sebagai berikut :



Keterangan Skema :

1. *Arrahin* (Nasabah) mengajukan permohonan fasilitas Gadai kepada *murthathin* (BRI Syariah) dengan membawa identitas diri dan perhiasan emas yang akan dititipkan selama pinjaman diterima.
2. a. Pihak bank melakukan proses penilaian atas mas yang akan digadaikan tersebut.

- b. Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dari fasilitas pinjaman Gadai Syariah melakukan perjanjian Rahn/Qardh dan ijarah / jasa penyimpanan barang berharga.
- 3. Pihak bank melakukan pencairan dana kepada nasabah setelah nasabah menyetujui akad Pinjaman Gadai Emas Syariah dan membayar biaya-biaya yang ditetapkan.
- 4. Nasabah dapat mengembalikan dana pinjaman dari pihak bank pada saat jatuh tempo pinjaman atau pada waktu yang lebih cepat dengan sebelumnya membayar upah/fee kepada pihak bank untuk fasilitas penitipan barang.
- 5. Pihak bank akan menyerahkan barang titipan nasabah setelah nasabah mengembalikan pinjaman.

b. Petunjuk Pelaksanaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru

Berikut ini adalah petunjuk-petunjuk pelaksanaan produk gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah pekanbaru adalah :

a. Pelunasan Pinjaman Sebagian

Jumlah pinjaman kebajikan atau Qardh untuk Bank BRI Syariah yang dapat diberikan adalah :

- 1. Barang emas minimal sebesar 2 gram, 16 karat dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan disesuaikan dengan ketentuan pemberian fasilitas gadai emas pada Bank BRI Syariah.

2. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan permohonan nasabah dan maksimal sebesar 90 % dari nilai taksiran barang.
3. Maksimal pemberian pinjaman sebesar Rp 100 juta.

b. Penaksiran Barang Jaminan

Taksiran barang jaminan pinjaman gadai diperoleh dengan cara melakukan perkalian harga pasar barang jaminan tersebut dengan presentase patok taksiran. Besarnya presentase patok taksiran untuk tiap-tiap jenis barang jaminan yang berbeda-beda dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi.

c. Perjanjian atau Kesepakatan Gadai Syariah

Nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman gadai syariah wajib menandatangani perjanjian atau kesepakatan yaitu :

1. Perjanjian Gadai (*Rahn*) dengan menggunakan prinsip Qardh yaitu peminjaman dana dalam jangka waktu tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sesuai pinjaman.
2. Pengikatan barang atau objek barang jaminan dengan pengikatan secara gadai yaitu penahan barang sebagai jaminan utang.
3. Jasa penitipan dan pemeliharaan obyek gadai menggunakan perjanjian ijarah (sewa tempat) yaitu penyewaan penyimpanan dan pemeliharaan barang yang digadaikan dalam jangka waktu tertentu.

d. Setifikat Gadai Syariah

Sertifikat Gadai Syariah adalah surat bukti akad perjanjian pinjaman dan penyimpanan barang jaminan antara Bank BRI Syariah

dan nasabah yang berisi kesepakatan bersama, yang dibuktikan dengan tanda tangan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman dana dan sewa tempat emas pada Bank BRI Syariah Pekanbaru maksimal sebesar 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang lagi dengan perjanjian baru yang dibuat nasabah kepada pihak bank.

f. Pelunasan Pinjaman Sebagian

Ketentuan mengenai pelunasan pinjaman sebagian sebagai berikut :

1. Jika pelunasan pinjaman sebagian tanpa mengambil barang jaminan yang disimpan/ dijaminkan, maka tidak diperkenankan.
2. Jika pelunasan pinjaman sebagian dengan pelunasan dengan mengambil sebagian dari barang jaminan yang disimpan senilai dengan pelunasan yang dilakukan, maka dilakukan akad baru dengan nilai taksiran dari sisa barang jaminan yang akan disimpan dan nasabah harus membayar biaya sewa tempat sampai dengan tanggal dilakukannya pelunasan sebagian tersebut.

g. Pelunasan Pinjaman Dipercepat

Pelunasan pinjaman dipercepat adalah dimana nasabah melunasi pinjaman secara sekaligus, dan membayar sewa berdasarkan tarif yang dihitung per 10 hari. Sebagai mana dapat kita lihat contoh yaitu pelunasan dipercepat dengan jangka waktu 45 hari, maka nasabah berkewajiban membayar biaya sewa selama 50 hari (karna 45 hari

sudah lebih dari 40 hari). Atau dapat juga kita lihat dari table dibawah ini sebagai berikut :

NO	Pelunasan Dipercepat dengan masa simpan	Tarif sewa tempat
1.	≤ 10 hari	10 hari
2.	10 hari < jangka waktu ≤ 20 hari	20 hari
3.	20 hari < jangka waktu ≤ 30 hari	30 hari
4.	30 hari < jangka waktu ≤ 40 hari	40 hari
5.	40 hari < jangka waktu ≤ 50 hari	50 hari
	Dan seterusnya.....	Kelipatan 10 hari

6. Tenggang Waktu Setelah Jatuh Tempo

Pada saat jatuh tempo nasabah diberikan tenggang waktu selama maksimal empat hari kalender setelah jatuh tempo untuk menembus barang atau memperpanjang jangka waktu jika nasabah menggunakan masa tenggangnya, maka nasabah dikenakan biaya ganti rugi (*tawidh*) yang dihitung berdasarkan upah simpan barang selama masa penyimpanan yang dipakai.

i. Pengambilan Barang Jaminan Saat Pelunasan Pinjaman

1. Pelunasan dapat dilakukan nasabah secara sekaligus pada saat jatuh tempo pinjaman dan saat itu juga nasabah mengambil barang jaminan.
2. Jika pelunasan pinjaman tidak disertai dengan pengambilan barang jaminan , maka bank memberikan batas waktu. Batas waktu waktu

pengambilan barang adalah sampai dengan 16 (enam belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo, lewat dari batas waktu tersebut barang jaminan akan disalurkan sebagai sedekah.

3. Jika dalam masa tenggang 16 hari tersebut nasabah mengambil barang jaminan, maka nasabah tetap dikenakan biaya penyimpanan dan pengamanan sebesar biaya sewa secara harian berdasarkan tariff biaya sewa yang berlaku saat itu.

c. Operational Pembiayaan Gadai Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Dalam pelaksanaan analisis prosedur pinjaman dengan gadai emas yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru. Masih ditemukan kekurangan diantaranya pihak bank kurang memperhatikan penyertaan surat keterangan pemilik atau faktur pembelian atas emas atau perhiasan sebagai syarat permohonan pinjaman dengan gadai emas syariah, banyak para nasabah yang menggadaikan emas tersebut tanpa adanya surat keterangan kepemilikan atau

faktur pembelian atas emas. Padahal surat keterangan pemilik atas emas merupakan kewajiban yang sangat penting dalam hak kepemilikan atas emas yang akan digadaikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat melakukan fasilitas gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru. emas atau perhiasan yang akan digadaikan milik sah dan penuh debitur atau nasabah. Oleh karena itu bagi nasabah yang akan melakukan gadai emas harus menyertakan surat keterangan pemilik atau faktur pembelian atas emas atau perhiasan agar emas atau perhiasan yang digadaikan menjadi jelas tentang hak miliknya. Agar tidak ada kekeliruan dan penipuan atas emas atau perhiasan yang digadaikan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Analisis prosedur pemberian pinjaman dengan gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru pada bagian pembiayaan belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari belum lengkapnya syarat saat melakukan gadai emas yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru.
2. Pihak bank tidak meminta surat keterangan pemilik atau faktur pembelian atas emas pada saat nasabah mengajukan permohonan gadai emas. Hal ini karena kurangnya perhatian terhadap salah satu syarat dalam analisis prosedur tersebut, akan sangat beresiko kepada pihak PT. Bank BRI Syariah karena barang yang digadaikan tidak dapat diketahui kebenaran pemiliknya.

B. Saran

Dari uraian pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka hal-hal yang perlu disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait terutama bagian pelayanan gadai dalam pelaksanaan analisis prosedur pinjaman dengan gadai emas pada PT. Bank BRI Syariah ialah :

1. PT. Bank BRI Syariah harus menegaskan kepada nasabah untuk menyertakan surat keterangan pemilik atau bukti pembelian atas emas yang akan digadaikan dalam syarat-syarat dalam mengajukan permohonan gadai emas syariah. Hal ini sangat penting untuk menghindari penipuan dan hal – hal lainnya karena pada saat dimulainya perjanjian akad yang ditandatangani oleh pihak nasabah dan pihak bank, pihak bank akan bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang digadaikan sampai berakhirnya akad atas gadai emas syariah tersebut.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah agar lebih menampung saran dan keluhan masyarakat sehingga dapat memudahkan bank dalam mengatasi masalah yang ada dilapangan.
3. Dalam prosedur gadai emas yang menjadi primadona bagi masyarakat pekanbaru khususnya, PT. Bank BRI Syariah harus menyediakan tempat untuk bagian gadai emas sesuai dengan kuota pegawai dan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota. Surabaya, 1989
- Ali, Muhammad. 2003. *Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. PT. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- At – Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet I, Yogyakarta: Maktabah Alhanif.
- Darmawi, Herman, 2001, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fuady, munir. 2003. *hukum perbankan modern*. PT. Catra Aditya Bakti. Bandung.
- Hope, Van. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru. Jakarta.
- Kamarudin. 2006. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. UII Pres. Yogyakarta.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2002. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Malayu S.P, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Manurung, Mandala. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter Kajian Kontekstual Indonesia*". Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Masya, Ismail. 2003. *Teori Prosedur*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. 2003. *Fiqh Sunnah (Fiquh Sunnah)*. Jilid 13. Cetakan Kedelapan. Terjemahan oleh Kamaluddin A. Marzuki. Al Ma'arif. Bandung.
- Silvanita, Ktut Mangani, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 2003. *Manajemen Dana Bank*. PT. Bumi Akasara. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Sistem dan Prosedur Kerja*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998.
- Usman, Rahmadi. 2004. *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.